

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan beraneka macam jenis suku, ras, etnis, dan agama menjadikan adanya keberagaman masyarakatnya. Keberagaman masyarakat tersebut menjadi Indonesia sebuah negara multikultural yang didalamnya terdapat kehidupan akan adanya perbedaan yang harapannya menciptakan sebuah harmonisasi kultural. Indonesia mampu menunjukkan bahwa masyarakatnya mampu menjaga keberagaman dan tetap menghargai satu sama lain, dan menjunjung tinggi persatuan serta mampu menjalankan sila ketiga Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

Tersebar nya masyarakat dengan suku, ras, dan etnis menjadikan adanya identitas etnis atau etnisitas dan terbentuknya politik identitas dan politik etnis. Identitas etnis sendiri dikategorikan oleh kelompok berdasarkan hubungan keluarga, budaya, dan agama. Identitas etnis menjelaskan bahwa kelompok dan individu dibangun berdasarkan pengalaman (subjektivitas) dan sejarah (objektivitas). Sedangkan politik identitas sendiri dapat diartikan sebagai tindakan politis yang mengedepankan kepentingan anggota dari suatu kumpulan karena adanya kesamaan identitas atau karakteristik, baik itu kesamaan ras, etnisitas, gender, dan keagamaan (Triyono,2008). Berbagai etnis yang menetap di Indonesia beberapa diantaranya adalah etnis pendatang yang salah satunya adalah etnis Tionghoa. Berbicara tentang masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia, partisipasi

dan eksistensi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi mengalami sebuah adanya dinamika politik di dalamnya.

Eksistensi etnis Tionghoa diawali pada era Orde Baru yang dimana saat Soeharto mengerahkan tindakan-tindakan represif pasca peristiwa Gerakan 30 September dengan munculnya kampanye serta aksi anti-Tionghoa di berbagai daerah yang disertai dengan tindakan penjarahan, pembakaran dan perusakan rumah serta toko dan sekolah. Tindakan-tindakan ini yang menjadikan diskriminasi etnis Tionghoa yang sangat mencolok, dengan ruang gerak yang dibatasi dalam bidang politik, sosial dan budaya. Adanya regulasi dari pemerintah Orde Baru untuk melakukan fusi untuk partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlatarbelakang dan bercorak Islam, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) yang berpedoman Nasionalis serta Golongan Karya (Golkar), tanpa adanya partai politik yang bercorak etnis membuat masyarakat etnis Tionghoa ini menjadi kehilangan wadah dan kesempatan untuk berpartisipasi. Dikarenakan dinamika politik yang tambah diperparah dengan adanya tekanan yang besar terhadap masyarakat Tionghoa sejak awal Orde Baru, hal inipun juga berdampak pada hubungan antara Indonesia dengan Cina. Namun, setelah adanya perbaikan hubungan Indonesia Cina pada tahun 1991, terdapat peluang dan kesempatan bagi masyarakat etnis Tionghoa dalam bidang politik, seperti dengan munculnya dan terpilihnya Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu, walaupun masih bisa dikatakan bahwa keterlibatan peran politik dan eksistensi etnis Tionghoa masih sangat kecil dan terbatas.

Kebangkitan demokrasi pasca runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 meluapkan semangat etnis Tionghoa dalam berpolitik. Pelaksanaan pemilu 1999, terdapat beberapa partai yang menggunakan latar belakang etnis Tionghoa yakni Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Dilansir dari Artikel Indonesia Media, hanya PBI yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM yang mampu menempatkan satu orang di kursi DPR. Partai politik yang berlandaskan etnis dan digiatkan oleh warga etnis Tionghoa di Indonesia dianggap kurang prospektif. Masalah etnis memang merupakan hal yang sensitif karena bergesekan dengan nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kusuma dan Satya (2006: 65) menyatakan bahwa pada pemilu setelah Orde Baru walaupun ada partai politik yang didirikan oleh masyarakat Tionghoa, atau partai politik yang terbuka untuk masyarakat Tionghoa dapat bergabung di dalamnya, sebagian besar masyarakat Tionghoa masih menunjukkan sikap monoloyalitasnya terhadap partai politik. Sehingga pada Pemilu 1999, partai politik seperti Parti dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) tidak cukup mendapat suara. Eksistensi dan keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilu 1999 masih dikatakan belum maksimal, namun dengan terpilihnya Kwik Kian Gie yang maju sebagai DPR melalui Partai Tionghoa sehingga pada akhirnya diangkat menjadi Menteri (Jawa Pos: 2016). Melalui Kwik Kian Gie sebagai tonggak estafet eksistensi dari masyarakat etnis Tionghoa dalam berkancah di bidang politik.

Sejak reformasi, iklim demokratis nasional telah membuka ruang bagi warga negara Tiongkok untuk berpartisipasi dalam penggunaan hak suara dan

berpartisipasi langsung dalam bidang politik. Dengan berpartisipasi dalam pemungutan suara di semua debat politik dan tahap politik, kelompok etnis Tionghok menarik perhatian kelompok etnis khusus. Dengan melalui pemilu 2004, menjadi berlangsungnya pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia pertama yang terjadi di Indonesia. Dan keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa umumnya diawali dengan bergabung dalam partai agama, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang bahkan tak sedikit calon legislatifnya adalah masyarakat etnis Tionghoa. Sehingga penyelenggaraan diskusi publik pun meningkat intensitasnya (Kompas: 2004).

Pada pemilu 2009, etnis Tionghoa mulai menyadari akan adanya perbedaan perlakuan politisasi dan lebih memilih bergabung dalam partai lokal bahkan partai dengan ideologi nasionalis, seperti ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golongan Karya, Demokrat, bahkan Partai Keadilan Sejahtera. Hal tersebut didukung dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa etnis Tionghoa merupakan warna negara Indonesia dan dapat mendaftar dan berpartisipasi menjadi calon partai politik. Tak hanya itu, lahir juga Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik yang disahkan DPR pada 27 Oktober 2008. Yang dengan adanya Undang-Undang ini menjamin kebebasan etnis Tionghoa dalam berperan sebagai warga negara dan juga menjamin bahwa sekat yang bersifat 'etnis' sudah tidak berlaku.

Pemilu 2014 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan calon legislatif. Dilansir dari Artikel *Asia Pasific*, PDI Perjuangan sebagai partai penyumbang calon legislatif terbesar dalam pemilu 2014. Dan dalam pemilu 2014 ini juga stigma sosial politik nasional

juga ditandai dengan meningkatnya peran politik masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia, salah satunya dengan keberadaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menjabat sebagai mantan Bupati Belitong Timur pada tahun 2014. Keberadaan Ahok sebagai pemimpin dengan latar belakang etnis Tionghoa menjadi membuka dan memberikan pandangan baru tentang minoritas yang mampu menjadi pemimpin, walaupun stigma politik nasional masih sering menggunakan politik identitas sebagai alat dalam meraih kekuasaan (Herdiansyah, 2017) sehingga saat itu keberadaan Ahok masih sangat rentan dalam objek praktik politik identitas. Tak hanya Ahok yang tampil sebagai bentuk eksistensi dan mewakili suara masyarakat etnis Tionghoa, terdapat Harry Tanoesoedibjo yang seorang pengusaha yang mendirikan partai, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berlandaskan Nasionalis dan Pancasila pada tanggal 7 Februari 2015. Keberadaan pemimpin partai politik dari etnis Tionghoa juga membuka pandangan baru yang dapat memberikan dampak yang berbeda dan faktor pembeda.

Sedangkan dalam Pemilu 2019 menjadi istimewa karena juga dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif. Sebagai pertama kalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia, akan digelar secara bersamaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada hari yang sama, dan pada pemilu 2019 ini juga dikenal dengan sebutan “Pemilu Lima Kotak”. Namun apabila dilihat dari kontestasi Pilkada di salah satu provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta banyak disinyalir bahwa beberapa pihak sarat dengan mobilisasi pemilih melalui praktik politik identitas, mengingat setelah terjadinya Gerakan Massa Aksi 212.

Dalam Pemilu periode 2024 ini, salah satu eksistensi etnis Tionghoa yang menarik khalayak umum dengan munculnya calon legislatif DPR RI Dapil Jakarta III dari Partai Perindo yakni Tjioe Nofia atau biasa dikenal dengan *Ci Mehong*. Tjioe Nofia dikenal melalui *platform* TikTok dan Instagram yang kini juga mengepakkan sayap ke dunia politik dan bergabung dalam Partai Perindo. Dengan keberadaan Tjioe Nofia yang berlatarbelakang etnis Tionghoa dan berangkat dari seorang pengusaha juga masih membuka pandangan mengenai partisipasi masyarakat etnis Tionghoa masih menjadi bukti bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi.

Dari sekian peristiwa dan dinamika yang sampai hari ini dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa dalam berpartisipasi menunjukkan adanya pergerakan, dengan mendobrak stigma politik nasional mengenai ‘etnis’ dan partisipasi masyarakat Indonesia yang tidak berbau politik identitas. Keberagaman yang sudah melebur juga membantu adanya kesempatan untuk masyarakat etnis Tionghoa dalam berpartisipasi di dunia politik bahkan kontestasi politik, dengan melihat perjuangan anggota legislatif yang berasal dari kota Semarang, yakni Melly Pangestu yang melawan adanya politik identitas di kota Semarang dengan terjun menjadi Ketua DPD dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang (Riska Farasonalia/Serat.id). Dengan menjadi seorang yang berpengaruh dalam pemerintah menjadi satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan, dan dengan memiliki adanya kesadaran politik yang mungkin saat ini masih sarat bagi tak banyak masyarakat etnis Tionghoa khususnya di Kota Semarang juga perlu diperdalam melalui adanya keberadaan Melly Pangestu.

Dari beberapa hasil temuan sebelumnya menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, dinamika politik yang diterima oleh etnis Tionghoa telah mengalami banyak proses termasuk kekerasan rasial, diskriminasi, dan marginalisasi yang mengakibatkan pada proses dan lembaga politik dan akibatnya adalah minimnya peran dan partisipasi etnis Tionghoa dalam politik nasional. Namun pada tiap masa, sejak zaman Orde Baru hingga Pasca Reformasi, menunjukkan bahwa sebuah sistem sosial mengalami dinamika dan proses sesuai dengan sistem politik yang berlaku saat itu, dan adanya dinamika itulah memiliki perbedaan dengan adanya interaksi dan interdependensi etnis Tionghoa dalam partai politik yang akhirnya mampu menunjukkan sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi politisi Tionghoa di Kota Semarang tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis eksistensi politisi Tionghoa di Kota Semarang tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya ilmu dan pemahaman pembaca mengenai eksistensi politisi Tionghoa.
2. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana eksistensi politisi Tionghoa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran tentang eksistensi politisi Tionghoa.

1.5 Literature Review

Dalam melakukan penelitian mengenai Eksistensi Etnis Tionghoa dalam Politik di Kota Semarang Tahun 2024 tentunya penulis membaca dan mengamati beberapa kajian dengan penelitian terdahulu yang penulis temukan dengan beragam subjek dan hasil penelitian yang berbeda, namun tetap bersinggungan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang penulis ambil, antara lain :

Penelitian terdahulu pertama yang penulis ambil sebagai gambaran dan acuan dalam pengerjaan penelitian ini adalah penelitian dengan judul “Eksistensi Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara” (Alam, 2024). Studi ini meneliti realitas politik identitas di kota Ternate, yang dipengaruhi oleh hal-hal terkait agama dan identitas yang sering dikaitkan dengan politik dan pemerintah, dan mengelola identitas yang berbeda berdasarkan menjadi kekuatan dominan dalam memerintah suatu wilayah dengan identitas atau minat kelompok yang pasti. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi politik identitas, faktor penyebab dan dampak yang timbul dari praktik tersebut terkhusus dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di kota Ternate. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi politik identitas pada Pilkada Kota Ternate tersebut nyata dan sejauh ini masyarakat Kota Ternate melaksanakan aktivitas politik dengan menggunakan metode politik modern. Dan tidak dapat terelakkan bahwa ditemukan

elit politik maupun partai politik memanfaatkan adanya politik identitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum, dari yang umum hingga regional, khususnya di kota ternate, tidak boleh terganggu oleh identitas, etnis, dan kandidat potensial sendiri, karena dapat mengakibatkan perlunya pendidikan politik tambahan.

Kemudian rujukan kedua, penulis ambil dari penelitian dengan judul “Eksistensi Etnis Tionghoa Pasca Orde Baru Di Kota Tasikmalaya” (Pardede, 2019). Fokus pembahasan penelitian ini adalah dilatarbelakangi oleh tindakan diskriminasi dan doktrin antiChina yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa pada saat itu melalui kebijakan-kebijakannya dan pemerintah Kota Tasikmalaya pada pasca Orde Baru membuat adanya regulasi yang dianggap intoleransi di Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan keberadaan etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya setelah Orde Baru. Teori yang digunakan adalah teori Eksistensi dan teori Politik Identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan penelitian kualitatif, perekaman data, pengurangan data, presentasi data, kesimpulan, dan teknik analisis data dalam efektivitas data. Hasil temuan menyatakan bahwa dinamika eksistensi etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya menemukan banyak kendala dan bahkan hambatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Untuk melawan dan menepis itu semua etnis Tionghoa melakukan perjuangan eksistensi yang dilakukan untuk individu maupun kelompok, yakni berbaur dengan masyarakat, melakukan perencanaan untuk jangka panjang. Ini semua dilakukan dan diupayakan untuk mencapai indikator utama adanya Eksistensi yaitu kebebasan.

Berikutnya, terdapat penelitian jurnal dengan judul “Politik Identitas Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan” (Lutfiansyah, 2020). Fokus penelitian ini adalah permasalahan masyarakat adat yang ada di Indonesia kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya adalah masyarakat adat Sunda Wiwitan. Eksistensi Sunda Wiwitan kini mengalami adanya kemunduran lantaran adanya situasi politik sebagai akibatnya yang menyebabkan warga Sunda Wiwitan kurang berperan pada situasi politik. Tujuan berdasarkan penelitian ini merupakan bahwa perlu adanya penguatan pada Perlindungan Hukum Administratif lantaran warga aturan tata cara memiliki aturan yg sama menggunakan warga biasa secara administratif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Identitas dan juga teori *Subaltern*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Etnografi yang dengan menggunakan metode ini guna memperkuat teori agar dapat mendeskripsikan dan membuka pandangan tentang yang terjadi dengan masyarakat hukum adat yang ada. Hasil penelitian ini adalah melalui kasus polemik yang terjadi diantara masyarakat adat Sunda yang seharusnya menjadi pandangan untuk kesadaran dalam memperkuat kembali keyakinan dalam setiap anggota masyarakat adat untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Penelitian terdahulu yang keempat adalah penelitian jurnal dengan judul “Kebertahanan Aktor Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kota Makassar” (Bareilly, 2021). Dari penelitian ini membahas kompetisi antar aktor antar etnik yang disebabkan kompetisi internal keanggotaan partai politik, kompetisi dalam perbedaan agama dan pengaruhnya terhadap masyarakat pemilih,

dan kampanye yang menghadirkan isu yang saling bertentangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik etnis di Kota Makassar dengan menjelaskan pada aspek minoritas etnis serta kemampuan dan upaya masyarakat etnis minoritas untuk bertahan dalam kompetensi etnik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Makassar serta mengidentifikasi eksistensi etnik Tionghoa dan Hambatan Aktor etnis dalam mempertahankan eksistensinya pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Makassar. Teknik pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi pemaknaan kata-kata lisan dan tulis serta tingkah laku teramati dari subjek penelitian. Teori yang dipakai adalah teori Politik Etnis (Kellas), Modal Sosial (Putnam), dan Arti Aktor Politik (MC Nair), Jaringan dan Strategi Aktor melalui Analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya aktor etnis Tionghoa dalam membangun kebertahanannya dilakukan melalui sosialisasi secara intens sebagai dasar pelaksanaan survey terhadap aktor dan membangun kebertahanannya dengan menjaga ketokohan aktor etnis Tionghoa dalam memaksimalkan potensi dirinya melalui analisis SWOT.

Kemudian penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian jurnal dengan judul “Peran Politik Identitas Etnis Dalam Mempertahankan Kekuasaan (Studi Kasus Pilkades Di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka)” (De Araujo, 2024). Fokus dari penelitian ini adalah peran politik identitas dalam mempertahankan kekuasaan serta dampak politik identitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran politik identitas etnis dan bagaimana dampak politik identitas etnis itu sendiri dalam penyelenggaraan

Pilkades di Desa Numponi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik identitas di Desa Numponi sering digunakan menjadi “alat kampanye” oleh para masing-masing calon sebagai basis dan indikator dalam mencapai kekuasaan atau jabatan sebagai kepala desa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan diatas terlihat jelas perbedaannya, namun tetap ada penelitian yang memiliki keterkaitan dan bersinggungan. Dari penelitian tersebut, penulis dapat terbantu untuk menyelesaikan proses pembuatan penelitian ini. Pada setiap penelitian terdahulu juga memberikan informasi serta pemahaman yang penulis butuhkan juga guna menghasilkan tulisan yang baik, benar, dan bermanfaat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Eksistensi

Eksistensi merujuk pada keberadaan atau kehadiran sesuatu, dan apabila melihat eksistensi dalam sudut pandang kehadiran sesuatu atau seseorang dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk yang pragmatis, sosial, dan terkait dengan kekuasaan. Terdapat pendapat beberapa pendapat beberapa para ahli yang menyatakan definisi mengenai eksistensi. Menurut Max Weber, eksistensi dilihat sebagai keberadaan yang berdaya. Eksistensi tercipta bukan hanya sekedar ‘ada’ tetapi juga ‘ada dan berpengaruh’. Lalu Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa eksistensi sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi, yang bahwasannya eksistensi dari penguasa atau negara bergantung pada pengakuan dan legitimasi dari rakyat. Eksistensi bagi Niccolo Machiavelli juga mendukung bahwa eksistensi dapat

diterima dan diakui secara sah dan mampu mempertahankan kekuasaan dan mendapat dukungan. Eksistensialisme merupakan sebuah bentuk alternatif yang melihat manusia pada eksistensinya, yang keberadaannya diakui dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Eksistensi memiliki pengertian khusus untuk keberadaan manusia, yakni bahwasannya manusia dalam keberadaannya sadar akan dirinya yang berada dan bersatu dalam realitas sosial.

Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zaenal sebagai suatu proses yang dinamis, dan mengada. Hal ini sesuai dengan eksistensi yang berasal dari kata *existere* yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Philip dan Duncan menganalogikan dalam manajemen cara mempertahankan sebuah Perusahaan dapat dilakukan melalui adanya pemasaran. Pemasaran merupakan sesuatu yang terdiri dari langkah yang digunakan untuk menempatkan barang yang dijual ke tangan pembeli atau konsumen, Melalui analogi yang dikemukakan oleh Philip dan Duncan ini bahwasannya mempertahankan sebuah eksistensi dapat dilakukan dengan segala langkah. Sama hal nya dengan mempertahankan eksistensi sebuah keaktoran dalam kontestasi politik. Eksistensi tidak dipandang sebagai konsep yang abstrak, melainkan sebagai keberadaan yang memiliki dampak, pengaruh, kekuasaan, dan pengakuan dalam ranah sosial dan politik. Adanya eksistensi suatu kelompok dalam politik tidak hanya sekedar “ada” melainkan tentang keberadaan yang berpengaruh, pengakuan, dan kemampuan untuk bertindak dalam sistem politik yang bahwasannya melalui adanya eksistensi ini suatu kelompok dapat memanifestasikan diri sebagai aktor yang relevan dan signifikan. Terdapat beberapa indikator penting dalam sebuah eksistensi, yakni :

1. Representasi Politik, dengan suatu kelompok yang menjadi keterwakilan dan keterlibatan dalam lembaga politik.
2. Partisipasi Politik, melalui partisipasi dan keikutsertaan dalam pencalonan anggota legislative.
3. Akses terhadap Proses Pengambilan Keputusan, yang melalui keterlibatan dalam penyusunan kebijakan lokal, konsultasi publik yang mengikutsertakan komunitas etnis, dan keberadaan sebagai saluran aspirasi.
4. Pengakuan Hukum dan Institusionalisasi,
5. Kebebasan Ekspresi Identitas Politik dan Budaya,
6. Pengaruh terhadap Kebijakan Publik, dan
7. Media dan Citra Publik Politik.

1.6.2 Politik Identitas

Isu politik di Indonesia, politik identitas lebih terkait pada masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan lokal. Politik identitas dimaknai dengan tindakan politis untuk mengedapankan kepentingan dari anggota suatu kelompok tertentu karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, yang berdasar ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi. Politisasi identitas yang dilakukan oleh para elite lokal dikreasi sedemikian rupa dan dijadikan sebagai basis perjuangan elit lokal dalam menikmati kekuasaan. Yang mesti dipahami bahwa politik identitas bukanlah politik dalam makna tradisional saja. Politik identitas juga berangkat dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan).

Politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, *gender*, dan keagamaan. Kemudian, apabila menurut Agnes Heller mendefinisikan bahwa politik identitas menjadi sebuah konsep dan gerakan politik yang fokusnya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Dan penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong adanya pertikaian. Politik identitas juga seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu yang berdasar pada primordialitas. Klaus Von Beyme menyatakan bahwa terdapat karakter gerakan politik identitas dalam beberapa tahap perkembangannya, yaitu :

- a) Pra Modern: dimana gerakan politik mengalami perpecahan secara fundamental, kelompok-kelompok kesukuan dan kebangsaan memunculkan gerakan politik yang menyeluruh. Dalam hal ini, mobilisasi secara ideologis dipelopori oleh para pemimpin.
- b) Modern: gerakan politik muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber untuk dimobilisasi. Peran pemimpin tak lagi dominan dan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan.
- c) Post Modern: gerakan politik muncul dari dinamika gerakan itu sendiri.

Kemudian terdapat dua faktor pokok yang membuat etnis menjadi menarik dan muncul untuk dipakai sebagai isu dalam politisi identitas dan pengaruhnya dalam proses politik, adalah:

- a) Ketika etnis menjadi faktor yang dipertaruhkan, terdapat semacam keperluan untuk mempertahankan dan memperjuangkan identitas suatu kelompok.
- b) Ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif, yang artinya melalui proses politik ini menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan. Dan sekarang kita melihat bagaimana para aktor yang terlibat di dalam proses politik ini mengelola isu seperti etnis.

1.6.2.1 Etnisitas

Etnisitas didefinisikan sesuai dengan identitas etnis. Identitas etnis menciptakan ikatan dari dalam dan berbeda dari kelompok lain, membuat setiap individu dalam kelompok subjektif dan simbolis. Keberadaan identitas individu dalam interaksi sosial pada dasarnya penting dalam semua interaksi sosial. Menurut Hogg dan Abram (1998) di dalam masyarakat sendiri secara hierarkis terstruktur kategori-kategori sosial yang merupakan penggolongan orang menurut negara, ras, kelas sosial, etnis, agama dan lain sebagainya.

Di dalam masing-masing kategori sosial tersebut melekat suatu kekuatan, status dan martabat yang pada akhirnya memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat. Isu etnis sebagai komoditas politik masih kerap terjadi. Berbagai perspektif tentang masalah sosial dan politik di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis yang ada. Upaya untuk mempolitisasi situasi dengan berpakaian dalam pakaian etnis dapat menyebabkan masalah dan menciptakan perbedaan yang dirasakan di antara kelompok etnis. Pada teori Politik Identitas ini

menurut Pierre Van Den Bergh dalam (Mayssara, 2014:22) menyampaikan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam melihat fenomena etnisitas ini, yakni :

- a) Pendekatan Primordialisme yang melihat bahwa fenomena etnis masuk dalam kategori sosio-biologis. Pada pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan, dan bahasa yang memang disadari secara lahiriah.
- b) Pendekatan Transaksionalisme. Pandangan ini melihat kelompok etnis sebagai salah satu unit yang ditentukan batas-batas sosialnya. Dan melalui pendekatan ini ditunjukkan dengan transaksi politik dalam mobilisasi politik.
- c) Pendekatan Instrumentalisme. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses mobilisasi politik apabila kelompok sosial tersusun atas dasar atribut etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa. Pada proses mobilisasi politik ini secara tidak langsung mengedepankan identitas etnis didalamnya.

Dari beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh Pierre menyatakan bahwa eksistensi politik identitas menimbulkan indikator-indikator dalam setiap pendekatannya; seperti Primordial yang meliputi etnis, agama, ras sebagai identitas, Transaksional yang memuat indikator momentum politik dan isu politik identitas itu sendiri, dan Instrumental yang terdiri dari indikator manipulasi mobilisasi dan solidaritas politik. Etnisitas menjadi lebih kuat dan, setelah runtuhnya tatanan baru pada tahun 1998, memperoleh posisi dinamika politik Indonesia, bersama dengan penerapan sistem terdistribusi. Dalam perkembangan Indonesia, etnisitas digunakan sebagai sarana perjuangan politik dan budaya untuk menjalani proses manipulasi elit dan memperjuangkan kekuasaan. Dalam bentuk konkret, konflik

primordial dapat bermanifestasi sebagai diskriminasi terhadap kelompok - kelompok primordial karena jumlahnya, yang dapat menyebabkan semangat regional atau etnosentrisme yang berlebihan. Bentuk dari etnisitas ini adalah sebuah identitas etnis yang dimana menurut Hank Johnston, Enrique Larana dan Joseph R. Gusfield (1994) menyatakan bahwa identitas terbagi menjadi identitas individu dan identitas kolektif. Serta penjelasan mengenai identitas individu dan identitas kolektif terdapat karakteristik dan konsep yang membedakan keduanya.

a) Identitas Individu

Identitas individu berkaitan dengan siapa dan diakui sebagai apa seorang dalam masyarakat terlepas dari ketergantungannya dengan orang lain. Identitas ini diperoleh dari lahir dan melalui interaksi dengan sesama. Ketika bergabung dalam satu komunitas sosial, seseorang bisa memiliki satu atau bahkan lebih identitas individu.

b) Identitas Kolektif

Identitas kolektif ini muncul akibat adanya interaksi yang terjadi antar individu di dalamnya. Keberadaan akan identitas seseorang akan diakui ketika seseorang melakukan interaksi dengan sesamanya. Karakteristik dari identitas kolektif ini dinilai dari kesungguhan individu dalam menjalin kerjasama dan membangun kedekatan antar sesama.

Kesamaan konsep yang pada awalnya akan menumbuhkan perasaan identitas dan pada akhirnya akan menumbuhkan pula kesadaran bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda dengan kelompok lain. Hal ini juga menegaskan bahwa identitas etnis merupakan hasil dari interaksi sosial, dan dengan interaksi

kelompok lain identitas etnis akan terbangun dan semakin kuat interaksi itu, semakin berkembang pula identitas etnisnya.

1.6.3 Jaringan Aktor

Teori jaringan aktor didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang digunakan guna untuk menganalisis berbagai elemen, baik manusia maupun non-manusia yang saling berinteraksi dan membentuk jaringan yang kompleks. Dalam teori jaringan aktor atau *Actor Network Theory* (ANT) terdapat aktor jaringan di dalamnya yang dimana aktor itu sendiri adalah semua elemen yang terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara alamiah. Salah satu tokoh dalam pengembangan teori jaringan aktor adalah Michel Callon, dan menurut Callon jaringan terdiri dari berbagai aktor yang berinteraksi. Aktor tidak hanya terbatas pada manusia, namun mencakup non-manusia yang adalah gagasan, benda, institusi. Dan setiap aktor memiliki peran dalam membentuk dan mempertahankan jaringan. Dalam teori jaringan aktor, proses penyelarasan kepentingan dari para aktor dinamakan dengan translasi. Callon mengatakan bahwa translasi dilakukan guna untuk meluruskan perbedaan agenda dan kepentingan para aktor. Proses translasi menurut Callon dibagi ke dalam empat alur yakni:

- 1) *Problematization*; ketika sebuah isu dan masalah dihadapkan pada aktor dan agar menjadi perhatian aktor-aktor lain. Dan dalam tahap ini, definisi peran dari tiap aktor dan definisi kepentingan harus konsisten.
- 2) *Interessement*; apabila tahapan problematisasi berhasil, para aktor akan terinisiasi akan mengikuti atau justru menolak. Pada tahap ini, aktor akan meyakinkan para pelaku lain bahwa kepentingan yang didefinisikan harus sejalan

- 3) dan para aktor akan ‘menandai’ hubungan saling menguntungkan dengan sebuah sistem aliansi, dan berupaya memperluas jaringan.
- 4) *Enrollment*; yakni jika *Interessement* berhasil dan proses ini dimulai dengan mengimplementasikan peran yang telah didefinisikan pada tahap *Problematization* di awal. Pada tahapan ini, perlu membangun sebuah jaringan yang solid dan perlu diorganisir.
- 5) *Mobilization*; terjadi saat jaringan aktor yang sudah memiliki eksistensi dan berupaya untuk meyakinkan anggota lain dalam jaringan untuk menjalankan peran yang sudah disepakati.

Dengan menggunakan teori jaringan aktor, indikator kunci dari teori ini dapat diidentifikasi beberapa jejaring di dalamnya, yakni:

- 1) Jaringan Sosial, yang meliputi;
 - a. Keluarga dan Klan, dengan jaringan keluarga menjadi basis awal bagi mobilisasi politik.
 - b. Asosiasi dan Organisasi, sebagai keanggotaan dalam organisasi/paguyuban/perkumpulan/kamar dagang dapat memperkuat jaringan.
 - c. Media sosial. melalui penggunaan media sosial untuk membangun dan menebar jaringan yang lebih luas dan tidak terjangkau.
- 2) Jaringan Politik, meliputi;
 - a. Partai politik, menjadi keanggotaan partai politik dan partisipasi menjadi indikator utama keterlibatan politik.

- b. Elit politik, dengan memiliki hubungan dengan elit politik, atau bahkan dapat mempengaruhi kebijakan publik.
 - c. Lembaga pemerintahan, melalui interaksi dengan lembaga pemerintahan guna mengadvokasi kepentingan komunitas.
- 3) Jaringan Ekonomi, yakni meliputi;
- a. Bisnis Keluarga, melalui jaringan usaha keluarga seringkali menjadi sumber daya utama untuk mendukung aktivitas politik.
 - b. Investasi, dengan aliran investasi juga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan pembangunan lokal.
 - c. Kamar Dagang, sebagai keanggotaan dalam kamar dagang dapat memberikan akses ke sumber daya ekonomi dan jaringan bisnis yang lebih luas.
- 4) Jaringan Budaya, yakni;
- a. Lembaga kebudayaan, dimana keterlibatan dalam lembaga kebudayaan dapat dikatakan memperkuat dan menjadi basis mobilisasi politik.
- 5) Hibridasi dan Transisi, meliputi;
- a. Adaptasi Budaya, dengan mengadaptasi budaya politik lokal dan nasional.
 - b. Pembentukan Koalisi, yakni pembentukan koalisi dengan kelompok sosial tertentu untuk memperkuat posisi tawar.
- 6) Aktor Non-Manusia, yang meliputi;
- a. Objek Material, dengan menggunakan sumber daya material seperti properti/dana/infrastruktur untuk mendukung aktivitas politik.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep atau konsep operasionalisasi merupakan proses untuk menjelaskan dengan secara terstruktur mengenai alur penelitian, dimana sesuatu yang abstrak sedemikian rupa diubah menjadi sesuatu yang konkret. Daripada itu penulis membuatkan sebuah tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Indikator Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
Eksistensi Etnis Tionghoa Dalam Politik Di Kota Semarang Tahun 2024	1. Eksistensi	Dengan tiga indikator dalam eksistensi yang meliputi : a) Representasi Politik b) Partisipasi Politik c) Akses terhadap Proses Pengambilan Keputusan
	2. Politik Identitas	Terdapat tiga pendekatan dalam politik identitas, yakni : a) Pendekatan Primordialisme b) Pendekatan Transaksionalisme c) Pendekatan Instrumentalisme
	3. Jaringan Aktor	Dengan tiga indikator dari teori jaringan aktor meliputi : a) Jaringan Sosial b) Jaringan Politik c) Jaringan Ekonomi

Penelitian ini menggambarkan fenomena bentuk eksistensi masyarakat etnis Tionghoa dalam politik. Berawal dari konsep tersebut lahirlah dua variabel seperti yang ada di dalam tabel di atas, yaitu meliputi politik identitas dan jaringan aktor.

Dari ketigas variabel tersebut dapat digunakan sebagai teori penelitian dan terdapat indikator masing-masing.

Pada variabel pertama yakni variabel eksistensi, dalam variabel ini mengulas indikator yang mempengaruhi eksistensi suatu individu/kelompok, Selanjutnya pada variabel kedua yakni politik identitas, variabel ini menjelaskan pendekatan dalam politik identitas, yakni Pendekatan, Primordialisme, Pendekatan Transaksionalisme, dan Pendekatan Instrumentalisme. Kemudian variabel ketiga, yaitu variabel jaringan aktor yang dalam indikatornya meliputi jaringan sosial, jaringan politik, dan jaringan ekonomi.

Adanya batasan tiga indikator penelitian pada variabel jaringan aktor, yakni Jaringan Sosial, Jaringan Politik, dan Jaringan Ekonomi. Hal ini beralasan karena pada indikator kunci lain dalam teori jaringan aktor seperti indikator Jaringan Budaya telah dikarakteristikan dalam Pendekatan Primordialisme, dan pada indikator Aktor Non Manusia yang tidak dapat dianalisis secara subjektif.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menggali, mengolah, serta mencari informasi dalam suatu data yang diperlukan dalam sebuah permasalahan yang ada.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dalam peristiwa sosial yang digambarkan secara terperinci dari data yang didapatkan pada informan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti (Wahidin, Saifullah, & Tabrani, 2015:77).

Pendekatan kualitatif ini memiliki pendekatan tersendiri dan dapat

menyesuaikan sesuai dengan objek yang akan diteliti, di mana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini mengetahui bentuk partisipasi masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang dalam partai politik. Metode kualitatif yang digunakan oleh penulis dikarenakan adanya beberapa pertimbangan, bahwa metode penelitian kualitatif dapat lebih bersifat fleksibel dan mudah dalam menyesuaikan kenyataan. Metode ini juga dapat memberikan pendekatan pada peneliti dan informan secara langsung. Penelitian ini memiliki tujuan dan arah untuk mendapatkan fakta yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam Partai Politik di Kota Semarang.

1.8.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini menjadi sarana pendukung dalam proses pengumpulan informasi dan fakta yang relevan yang nantinya mempengaruhi hasil analisis penelitian. Lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian oleh penulis adalah Kota Semarang.

Kemudian untuk subjek penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi ataupun penjelasan mengenai topik yang diteliti. Untuk teknik pengambilan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sumber informasi berdasarkan orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terdalam mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti, atau orang tersebut merupakan penguasa sehingga memudahkan penuliis untuk mengkaji objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).

1.8.3 Jenis Data

Jenis penelitian atau data yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada suatu ciri yang berhubungan dengan latar belakang serta situasi terkini. Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna meneliti terkait dengan partisipasi masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang dalam partai politik.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan dari seluruh keterangan maupun informasi yang didapatkan daripada informan. Pada umumnya ada 2 macam penelitian data yang dapat dianalisis, meliputi:

1. Data Primer

Sumber dari data primer adalah observasi, hasil wawancara dan dokumentasi/foto secara langsung dengan informan serta penelaah lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2018:456), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) menjelaskan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, dapat melalui perantara atau dokumen pendukung. Dalam data sekunder, data yang didapat dari berbagai macam data yang dipublikasikan melalui internet dan dibaca. Penelitian seperti bacaan literatur, buku referensi, jurnal ilmiah, dan lainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini sehingga dapat mempermudah proses penyusunan dan pembuatan laporan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang krusial dalam mengumpulkan data penelitian, karena tujuan dari penelitian ialah mengkoleksi data maka teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian terkait hal-hal yang ingin diteliti. Adapun subjek penelitian ialah individu, lokasi, atau objek yang akan ditelaah dalam proses penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung diarahkan pada subjek peneliti, tetapi melalui sebuah dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa jurnal, teks tertulis, gambar atau foto, maupun berita yang berkaitan dengan topik peneliti. Kemudian dokumen tertulis dapat berupa biografi, cerita, dan sejarah kehidupan

1.8.6 Subjek Penelitian

Individu dalam hal ini didefinisikan sebagai seorang informan guna menanyakan langsung mengenai topik yang akan dibahas. Informan tersebut diantaranya:

1.8.6.1 Politisi Tionghoa

1. Melly Pangestu, sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari F-PSI dan Wakil Ketua DPD PSI Kota Semarang.
2. Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom., sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari F-PDIP.
3. dr. Loise Mayasari, sebagai anggota Partai Gelora.
4. Michael, S.Kom., sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Semarang dari F-PDIP dan Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

1.8.6.2 Pengurus Partai Politik

1. Dyah Ratna Harimurti, S.Sos. M.AP., sebagai anggota Komisi D DPRD dan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.
2. F. Tika Mantofany, sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Semarang dan Wakil Ketua DPD PSI Kota Semarang.

Informan atau narasumber tersebut dipilih supaya proses mencari informasi yang dilakukan dapat terarah dari segi pelaksanaannya serta sesuai dengan pedoman, yaitu berupa garis besar materi yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti. Informan terdiri dari dua kategori, yakni politisi yang berlatar belakang etnis Tionghoa dan pengurus partai politik. Adapun jumlah informan yang penulis pilih sebanyak enam orang yang berdasarkan pada teknik pengambilan informan secara *purposive sampling*. Dalam kategori informan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam kontribusi mereka dalam dunia politik, sehingga memberikan perspektif yang sejalan dan signifikan dalam melihat dinamika politisi Tionghoa dalam politik. Melalui informan yang sudah ditentukan, menjadikan

penelitian ini bisa menekankan pada kecukupan data dan memperoleh data yang komprehensif sehingga data yang diperoleh penulis bisa dikatakan sebagai data jenuh.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yang juga digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Reduksi atau penyusutan data yang merupakan proses analisis data yang dilakukan dengan proses pemilihan, penggolongan, dan memusatkan fokus dan perhatian pada penyederhanaan seluruh data.
2. Penyajian data adalah data yang sudah didapatkan di tampilkan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk teks.
3. Penarikan Kesimpulan yang merupakan teknik analisis data yang harus dipikirkan oleh penulis secara terus menerus selama melakukan penelitian.

Pada pengolahan data setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data untuk mengurangi hal-hal yang tidak perlu dengan langkah sebagai berikut, yakni :

- a. Pengumpulan data, adalah hal pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya dengan mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah ada dalam Rumusan Masalah.
- b. Pemeriksaan data (*Editing*), yang adalah proses validasi data yang telah dikumpulkan, karena memungkinkan adanya data yang tidak perlu digunakan.

c. Penyusunan atau Sistematis Data (*Constructing and Systematizing*), yakni adalah pengelompokkan secara terstruktur pada data yang sudah diedit dan diberi tanda sesuai dengan klasifikasi data dan urutan masalah.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang adalah merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan maupun meringkas sebuah data berdasarkan hasil wawancara maupun pengamatan yang dilakukan dalam meneliti masalah di lapangan. Penelitian ini dilakukan guna memaparkan informasi secara faktual yang berkaitan dengan eksistensi etnis Tionghoa di Kota Semarang dalam politik.